

## PEMROV SULTRA TERIMA PENGHARGAAN KEMENKEU



*kbknews.id*

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 tidak hanya mengantarkan Pemrov Sultra meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi akurasi dan tranparansi dokumen keuangan itu juga mendapat apresiasi pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengundang Plt. Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata untuk menerima penghargaan keuangan dari Sri Mulyani. Dijadwalkan, Kamis (14/9) hari ini, Saleh Lasata akan menerima piagam tersebut.

Ditemui sebelum bertolak ke Jakarta, Saleh Lasata membenarkan undangan tersebut. “Ada undangan dari Kemenkeu. Banyak sekali agenda akhir-akhir ini. Tapi undangan itu juga penting karena menyangkut apresiasi ke daerah kita, jadi saya harus berangkat lagi,” jelasnya.

Dia mengaku bangga bila dipenghujung periodenya tetap masih mampu bekerja maksimal dan menorehkan prestasi. Terlebih itu di sektor keuangan. “Yang namanya keuangan ini kan terkait dengan semua sektor, semua SKPD. Pengelolaan pemerintahan kita tergantung dari bagaimana mengelola keuangan itu,” katanya.

Mantan Bupati Muna dua periode itu menambahkan, penghargaan itu bukan kali pertama diterima Pemrov, tahun 2016, Sultra juga memboyong piagam itu. Bahkan, ada tambahan dana *racha* karena tertibnya pelaporan keuangan itu. “Sebenarnya kita ini berjuang mempertahankan saja. Karena WTP saja sudah empat kali kita raih. Saya berharap tahun depan tetap WTP karena yang dilaporkan ini masih hasil kinerja kita yang sekarang, hanya akan disusun oleh gubernur selanjutnya. Karena Februari saya sudah pensiun, sementara LKPD itu nanti April-Mei baru diserahkan,” terangnya.

### **Sumber Berita:**

1. <http://rakyatsultra.fajar.co.id>, Sultra Dua Kali Terima Reward, Kamis, 14 September 2017
2. <http://kendaripos.co.id>, Pemprov Sultra Terima Penghargaan Kemenkeu, Kamis, 14 September 2017

### **Catatan:**

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun jenis-jenis Opini pada Laporan Keuangan Pemerintah berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 yaitu:

- a. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*),
- b. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*),
- c. opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
- d. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memeriksa kewajaran penyajian akun-akun laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- d. efektivitas sistem pengendalian intern

Dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah tahun 2017 didasarkan pada penilaian terhadap perbaikan indikator kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dapat menerima dana insentif daerah karena opini atas LKPD merupakan indikator kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah.